

Katalog: 3205014.7312

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019



BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN SOPPENG

DATA DAN INFORMASI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2019



Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Nomor Publikasi: 73120.2008

Katalog BPS: 3205014.7312

Ukuran Buku: 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman: xiv + 44 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Gambar Kulit:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Diterbitkan oleh:

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dicetak oleh:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Soppeng

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pembina:

Ir. H. Rustan

Pengarah:

Sukri, SE

Penulis:

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

Penyunting:

Yogi Surya Pratama, SST

Desain Cover:

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

Desain Layout

Muh. Faishal Nur Kamal, SST

<https://soppengkab.bps.go.id>



KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Setiap tahun, BPS berupaya menyajikan data terkait kemiskinan salah satunya melalui publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019”.

Publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019” berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Data dan informasi yang tersaji pada publikasi ini merupakan hasil penghitungan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) periode Maret 2019.

Diharapkan publikasi “Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019” dapat memberikan informasi yang memadai bagi semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Akhirnya, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian publikasi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Watansoppeng, Juni 2020

Kepala Badan Pusat Statistik

Kabupaten Soppeng

Ir. H. Rustan, M.Si.

NIP. 19661215 199301 1 001

<https://soppengkab.bps.go.id>

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	iii
Katalog	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	 3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Penulisan	4
1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan	 4
1.4 Sistematika Penulisan	 4
 BAB II KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN	 9
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan	 9
2.2 Indikator Kemiskinan	 11
2.3 Konsep dan Definisi Indikator Lain terkait Kemiskinan	 13
 BAB III KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG	 19

DAFTAR ISI

	Halaman
3.1 Perkembangan	
Tingkat Kemiskinan	19
3.2 Karakteristik	
Penduduk Miskin	22
3.3 Program	
Penanggulangan	
Kemiskinan	31
BAB IV PENUTUP	35
DAFTAR PUSTAKA	39
LAMPIRAN	41

<https://soppengkab.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P1, P2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	42
Tabel 2 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	42
Tabel 3 Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	42
Tabel 4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	43
Tabel 5 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	43
Tabel 6 Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	43
Tabel 7 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	44
Tabel 8 Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Rastra/Raskin dan Rata-Rata Berat Beras Rastra/Raskin yang Diterima di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	44

<https://soppengkab.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar 1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	20
Gambar 2	Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2015-2019	21
Gambar 3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Soppeng, 2015-2019	22
Gambar 4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	24
Gambar 5	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	25
Gambar 6	Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	25
Gambar 7	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Informal dan Formal di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	27
Gambar 8	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Pekerjaan Non Pertanian dan Pertanian di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	28
Gambar 9	Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	29
Gambar 10	Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Minum Layak dan Jamban	31

DAFTAR GAMBAR

		Halaman
	Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	
Gambar 11	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Rastra/Raskin dan Berat Rata-Rata Beras Rastra di Kabupaten Soppeng, 2015-2019	32
Gambar 12	Infografis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019	41

<https://soppengkab.bps.go.id>

sokje.id/kah.bps-go.id

BAB I

PENDAHULUAN

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di tengah kekayaan potensi alamnya yang melimpah, ternyata Indonesia masih dihadapkan dengan sebuah masalah klasik, yaitu masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di negara manapun dan menjadi masalah yang belum terselesaikan saat ini. Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Di sinilah terdapat peran BPS, yang telah dipercaya oleh pemerintah untuk mengumpulkan data-data kemiskinan di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Kabupaten Soppeng. Data kemiskinan yang lengkap dan akurat akan memudahkan pemerintah dalam membuat perencanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di daerahnya. Oleh karena itu, dalam rangka menyediakan data-data mengenai kemiskinan di Kabupaten Soppeng, maka BPS Kabupaten Soppeng menerbitkan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi salah satu dasar pemerintah Kabupaten Soppeng dalam merancang kebijakan pengentasan kemiskinan.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019 ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2019.
- b. Untuk mengetahui karakteristik rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2019.

1.3 Ruang Lingkup dan Data yang Digunakan

Ruang lingkup analisis publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan di Kabupaten Soppeng. Sumber data yang digunakan adalah data yang dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015-2019 modul Konsumsi/Pengeluaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam publikasi Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019 adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, tujuan penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan, serta sistematika penulisan.

BAB II KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN

Bab ini berisi metodologi penghitungan kemiskinan, indikator kemiskinan, serta beberapa konsep dan definisi mengenai kemiskinan dan indikator kemiskinan.

BAB III KONDISI KEMISKINAN DI KABUPATEN SOPPENG

Bab ini menjelaskan perkembangan tingkat kemiskinan, karakteristik penduduk miskin, dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Soppeng. Semua indikator di atas diulas serta dilengkapi dengan tabel dan grafik sehingga memudahkan para konsumen data dalam memahami kondisi kemiskinan yang ada di Kabupaten Soppeng.

BAB IV PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini, akan dijelaskan kembali poin-poin penting mengenai fenomena kemiskinan di Kabupaten Soppeng sehingga diharapkan dapat menjadi gambaran umum tingkat kemiskinan dan indikator-indikator kemiskinan yang ada di Kabupaten Soppeng.

<https://soppengkab.bps.go.id>

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB I I

KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB II KONSEP PENGHITUNGAN KEMISKINAN

2.1 Metodologi Penghitungan Kemiskinan

2.1.1 Konsep

1. Kemiskinan

Secara umum, jenis-jenis kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut diartikan sebagai deprivasi atau kekurangan atas kebutuhan dasar manusia untuk hidup layak, termasuk makanan, air bersih, sanitasi, sandang, tempat tinggal, kesehatan, dan pendidikan. Sedangkan kemiskinan relatif diartikan sebagai ketimpangan ekonomi, yang diukur dengan kelas pendapatan, antara kelompok masyarakat dengan kelas pendapatan terendah, menengah, dan tertinggi (Irawan, et al., 2017).

2. Garis Kemiskinan

Sebelum menghitung jumlah penduduk miskin, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Makanan merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan Garis Kemiskinan Non Makanan adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

2.1.2 Sumber Data

Sumber data utama yang dipakai adalah data hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Pada periode tahun 2015, data Susenas yang digunakan adalah Susenas modul konsumsi triwulan I, II, III dan IV. Untuk menghitung kemiskinan di tingkat kabupaten/kota maka dilakukan penggabungan keempat set data tersebut (triwulan I, II, III, dan IV), sehingga sampel rumah tangga cukup untuk mengestimasi kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Pada periode selanjutnya, yaitu tahun 2016, 2017, 2018 dan 2019, data yang digunakan adalah data Susenas modul Konsumsi/Pengeluaran bulan Maret (semester I) yang jumlah sampelnya sudah mencukupi untuk mengestimasi kemiskinan hingga level kabupaten/kota. Sementara itu penimbang yang digunakan adalah hasil proyeksi penduduk dari data Sensus Penduduk tahun 2010.

2.1.3 Metode Penghitungan Garis Kemiskinan

Tahapan dalam menghitung garis kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (2007) adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara, yaitu Garis kemiskinan pada periode lalu yang diinflasi dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.
2. Tahap kedua adalah menentukan Garis Kemiskinan Makanan. Garis kemiskinan makanan merupakan penjumlahan nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Selanjutnya Garis Kemiskinan Makanan tersebut disetarakan dengan

2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori.

3. Tahap ketiga adalah menentukan Garis Kemiskinan Non Makanan. Garis Kemiskinan Non Makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non makanan dihitung dengan menggunakan rasio pengeluaran komoditi/subkelompok tersebut terhadap total pengeluaran komoditi/subkelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar 2003 (SPKKD 2003), yang dilakukan untuk mengumpulkan data pengeluaran konsumsi rumah tangga per komoditi non makanan yang lebih rinci dibandingkan data Susenas modul konsumsi.
4. Tahap terakhir adalah menghitung Garis Kemiskinan yang merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan.

2.2 Indikator Kemiskinan

Menurut Foster, Greer, dan Thorbecke (1984, dalam Irawan, et al., 2017), ada tiga indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan absolut, baik dengan pengukuran berbasis pendapatan maupun kemampuan memenuhi kebutuhan dasar dari sisi pengeluaran, yaitu:

1. *Head-Count Index* (P_0)

Head-Count Index (P_0) adalah persentase penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan yang telah ditentukan, atau disebut tingkat insiden kemiskinan. Indeks P_0 hanya dapat memberikan informasi mengenai proporsi penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Keterbatasan indeks P_0 adalah indeks ini tidak bisa menjelaskan seberapa miskin atau sengsara para penduduk yang dikategorikan miskin tersebut.

2. *Poverty Gap Index* (P_1)

Poverty Gap Index (P_1) adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Tidak seperti indeks P_0 yang hanya memberikan informasi persentase dan jumlah penduduk miskin, indeks P_1 bisa mengindikasikan perubahan derajat kemiskinan di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks P_1 , maka semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Namun, indeks P_1 ini masih mempunyai kekurangan, yaitu tidak sensitif terhadap distribusi pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) antara penduduk miskin, sehingga tidak bisa mendeteksi keparahan kemiskinan (*poverty severity*).

3. *Poverty Severity Index* (P_2)

Poverty Severity Index (P_2) merupakan indeks yang bisa memberikan gambaran mengenai penyebaran pendapatan (atau pengeluaran sebagai proksi pendapatan) di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Ketiga indeks kemiskinan tersebut di atas bisa dihitung dengan menggunakan rumus FGT (Foster, Greer, Thorbecke) sebagai berikut.

$$P_\alpha = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^\alpha$$

Keterangan:

z : garis kemiskinan

y_i : rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i = 1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q : banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n : jumlah penduduk

α : parameter untuk ukuran sensitivitas kemiskinan ($\alpha = 0$ untuk menghitung P_0 , $\alpha = 1$ untuk menghitung P_1 , $\alpha = 0$ untuk menghitung P_2).

2.3 Konsep dan Definisi Indikator Lain terkait Kemiskinan

2.3.1 Pendidikan

1. Pendidikan yang ditamatkan

Pendidikan yang ditamatkan adalah proporsi seluruh kepala rumah tangga berumur 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki. Publikasi ini mengelompokkan ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki menjadi tiga, yaitu tidak mempunyai ijazah, mempunyai ijazah SD atau SMP dan mempunyai ijazah minimal SMA khusus untuk kepala rumah tangga miskin.

2. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) adalah proporsi seluruh penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam aksara tertentu. Publikasi ini hanya menyajikan angka melek huruf penduduk miskin menurut kelompok umur 15 – 24 tahun dan 15 – 55 tahun. Melek huruf yang dimaksudkan di sini adalah melek huruf latin, atau huruf arab, atau huruf lainnya.

3. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi dari seluruh penduduk miskin menurut berbagai kelompok umur tertentu (misalnya: 7-12 tahun, 13-15 tahun, 16-18 tahun, dan 19-24 tahun) yang masih duduk di bangku sekolah. Publikasi ini hanya menyajikan angka partisipasi sekolah penduduk miskin pada kelompok umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang dapat digunakan untuk melihat indikasi umum dari pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 tahun.

2.3.2 Ketenagakerjaan

1. Bekerja

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama 1 jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu. Penduduk yang dicatat untuk publikasi ini khusus penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas.

2. Bekerja di sektor informal

Bekerja di sektor informal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama baik berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, maupun pekerja keluarga/tidak dibayar.

3. Bekerja di sektor formal

Bekerja di sektor formal adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang mempunyai status/kedudukan dalam pekerjaan utama dengan berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar atau buruh/karyawan/pegawai.

4. Bekerja di sektor pertanian

Bekerja di sektor pertanian adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan dan pertanian lainnya.

5. Bekerja bukan di sektor pertanian

Bekerja bukan di sektor pertanian adalah proporsi penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang bekerja selain di sektor pertanian.

6. Tidak bekerja

Tidak bekerja adalah penduduk miskin berumur 15 tahun ke atas yang menjadi pencari pekerjaan/menganggur dan bukan Angkatan kerja (penduduk miskin yang tidak bekerja maupun tidak mencari pekerjaan).

2.3.3 Pengeluaran per Kapita

1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita adalah pengeluaran rumah tangga dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga.

2. Persentase Pengeluaran per Kapita untuk makanan

Persentase pengeluaran per kapita untuk makanan adalah pengeluaran per kapita untuk makanan dibagi dengan total pengeluaran per kapita (makanan + non makanan).

2.3.4 Fasilitas Perumahan

1. Rumah Tangga Pengguna Air Layak

Rumah tangga pengguna air layak adalah rumah tangga miskin yang menggunakan sumber utama air minum dari air tidak sustain (air hujan), air terlindung maupun tidak terlindung dengan syarat sumber mandi/cuci/dll yang digunakan berasal dari air terlindung.

2. Rumah Tangga Pengguna Jamban Sendiri/Bersama

Rumah tangga pengguna jamban sendiri/bersama adalah rumah tangga yang menggunakan fasilitas tempat pembuangan air besar yang digunakan.

2.3.5 Program Penanggulangan Kemiskinan

1. Program Rastra

Program Rastra (sebelumnya disebut program Beras Miskin/Raskin) adalah program bantuan dari pemerintah untuk keluarga berpendapatan rendah (rumah tangga miskin dan rentan) yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para Keluarga Sasaran Penerima Manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan khususnya beras.

2. Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Program Rastra)



Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Rumah Tangga Miskin penerima Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (Proram Rastra) adalah rumah tangga miskin yang menerima program nasional beras sejahtera (Rastra).

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB III

KONDISI KEMISKINAN
KABUPATEN SOPPENG

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB III KONDISI KEMISKINAN KABUPATEN SOPPENG

3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan

3.1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kabupaten Soppeng merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten yang beribukota di Watansoppeng ini memiliki luas wilayah 1.500 km². Seperti halnya kabupaten/kota lain, Kabupaten Soppeng juga menghadapi beberapa permasalahan, salah satunya adalah kemiskinan.

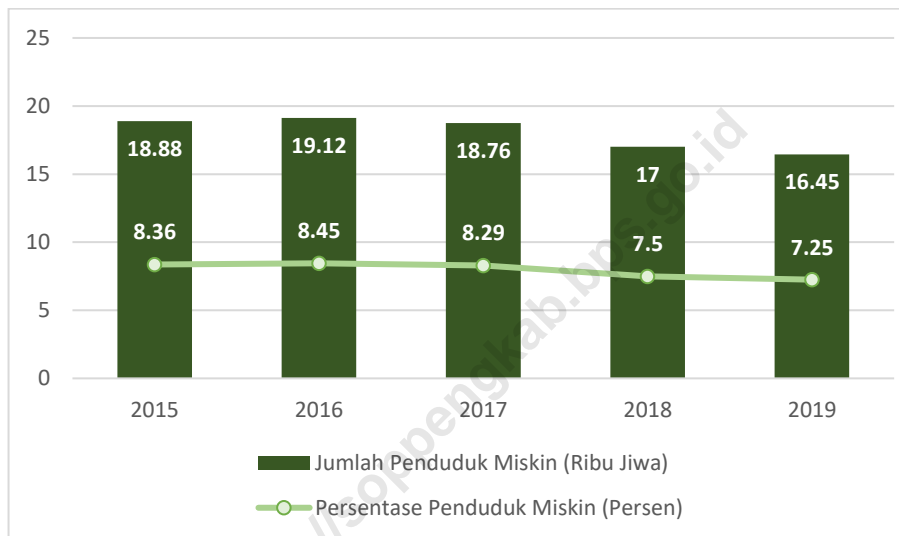
Fenomena kemiskinan secara umum dapat dilihat melalui beberapa indikator kemiskinan. Pertama, dengan melihat jumlah dan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan (P_0). Kedua, dengan melihat rata-rata jarak antara pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (P_1). Ketiga, dengan melihat sebaran pengeluaran di antara penduduk miskin (P_2).

Pada tahun 2019, masih ada sekitar 16.45 ribu penduduk miskin di Kabupaten Soppeng atau sekitar 7,25 persen dari total penduduk Kabupaten Soppeng. Mereka digolongkan miskin karena rata-rata pengeluaran bulanan baik untuk konsumsi makanan maupun bukan makanan masih dibawah garis kemiskinan yang saat itu mencapai Rp. 297.546/orang/bulan. Jika dilihat berdasarkan jumlah penduduk miskin, menurut Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Kabupaten Soppeng merupakan kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin nomor lima paling sedikit jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Sama halnya jika dilihat berdasarkan persentase penduduk miskin, dibandingkan dengan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Soppeng menjadi kabupaten dengan persentase penduduk miskin paling sedikit nomor enam di Provinsi Sulawesi Selatan.

Gambar 1 menunjukkan perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin (P_0) Kabupaten Soppeng tahun 2015-2019. Terlihat bahwa

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

jumlah dan persentase penduduk miskin di Kabupaten Soppeng mempunyai kecenderungan menurun. Jika dilihat dari periode tahun 2015-2019, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 17,00 ribu jiwa menjadi 16,45 ribu jiwa. Pada periode tahun tersebut, persentase penduduk miskin (P_0) juga mengalami penurunan dari 7,50 persen menjadi 7,25 persen.

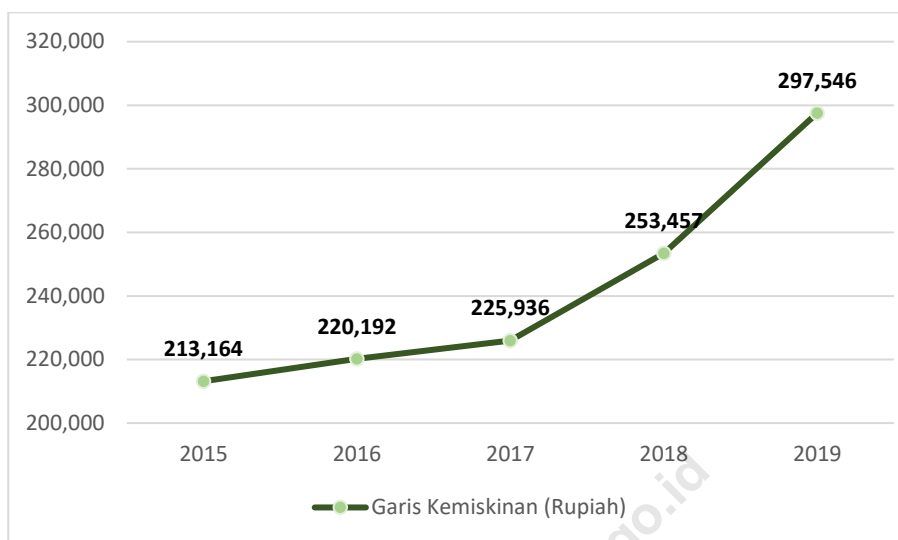


Gambar 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

3.1.2 Garis Kemiskinan

Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2, perkembangan garis kemiskinan Kabupaten Soppeng tahun 2015-2019 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019, garis kemiskinan Kabupaten Soppeng mencapai nilai Rp 297.546,00/orang/bulan, angka tersebut merupakan angka garis kemiskinan paling tinggi dalam lima tahun terakhir.



Gambar 2. Garis Kemiskinan Kabupaten Soppeng, 2015-2019

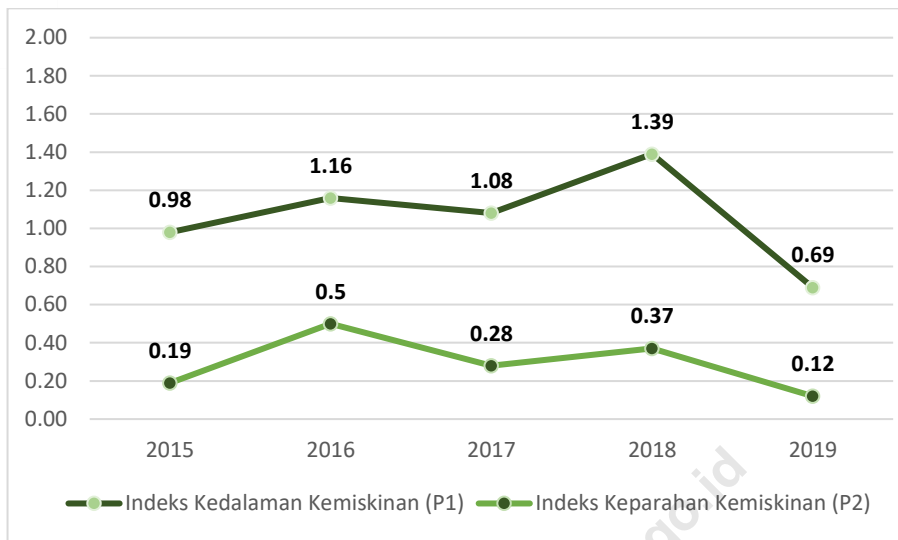
Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

3.1.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Indikator selanjutnya yang dapat menggambarkan kemiskinan adalah *poverty gap index* atau indeks ketimpangan kemiskinan (P_1) dan *poverty severity index* atau indeks keparahan kemiskinan (P_2). Gambar 3 menjelaskan bahwa angka indeks ketimpangan kemiskinan Kabupaten Soppeng pada periode tahun 2015-2019 cenderung fluktuatif dan mencapai angka 0,69 persen pada tahun 2019, lebih rendah daripada tahun sebelumnya. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin mendekati garis kemiskinan dan kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan relatif kecil.

Pada periode tahun 2015-2019, P_2 juga menunjukkan pola yang sama dengan P_1 . Walaupun sempat mengalami kenaikan dan penurunan, pada tahun 2019 nilai P_2 tercatat lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 0,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin berkurang.

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019



Gambar 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P_1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P_2) Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

3.2 Karakteristik Penduduk Miskin

3.2.1 Pendidikan

Kemiskinan berkaitan erat dengan tingkat pendidikan. Todaro (2003, dalam Cahyo, 2017) menyatakan bahwa salah satu penyebab kemiskinan suatu bangsa (masyarakat) adalah rendahnya pengetahuan. Rendahnya pengetahuan disebabkan karena rendahnya pendidikan dan kesempatan memperoleh pengetahuan.

Haughton dan Khander (2009) membagi faktor-faktor penyebab kemiskinan menjadi beberapa karakteristik, salah satunya adalah karakteristik sosial pada level rumah tangga dan individu. Karakteristik pendidikan, seperti tingkat pendidikan, ketersediaan pelayanan pendidikan, melek huruf, dan rata-rata lamanya sekolah penduduk dewasa di atas lima belas tahun, menjadi salah satu karakteristik sosial yang menjadi penyebab kemiskinan.

Pada tahun 2019, banyak penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng dengan tingkat Pendidikan tidak tamat SD, yaitu 45,62

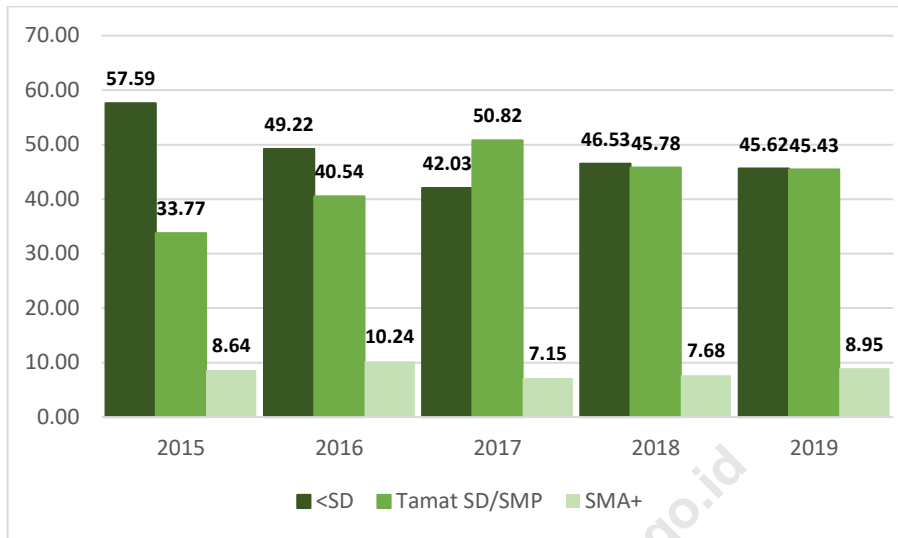
Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

persen. Sementara itu penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang berpendidikan tamat SD atau SMP ada sebanyak 45,43 persen, dan 8,95 persen lainnya berpendidikan tamat SMA ke atas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin rendah tingkat pendidikan, semakin banyak jumlah penduduk miskin usia 15 tahun ke atas.

Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019, diketahui bahwa tingkat pendidikan penduduk miskin di Kabupaten Soppeng tergolong masih rendah jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Provinsi Sulawesi Selatan. Bahkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD di Kabupaten Soppeng merupakan tertinggi kedua di Provinsi Sulawesi Selatan di bawah Kabupaten Bantaeng. Apabila dibandingkan dengan angka Provinsi Sulawesi Selatan, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD di Kabupaten Soppeng juga lebih tinggi dibandingkan dengan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD di Provinsi Sulawesi Selatan yang hanya mencapai 33,48 persen.

Pada periode tahun 2015-2019, seperti yang terlihat pada Gambar 4, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas baik yang berpendidikan tidak tamat SD, tamat SD atau SMP, maupun minimal tamat SMA, masih fluktuatif di tiap tahunnya. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak tamat SD pada tahun 2019 mencapai angka 45,62 persen, lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 57,59 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dengan tingkat pendidikan minimal tamat SMA mengalami kenaikan pada tahun 2019 persentasenya menjadi sebesar 8,95 persen lebih tinggi dari tahun 2015 yang mencapai 8,64 persen. Hal ini menunjukkan membaiknya tingkat pendidikan penduduk miskin selama kurun waktu 2015-2019.

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019



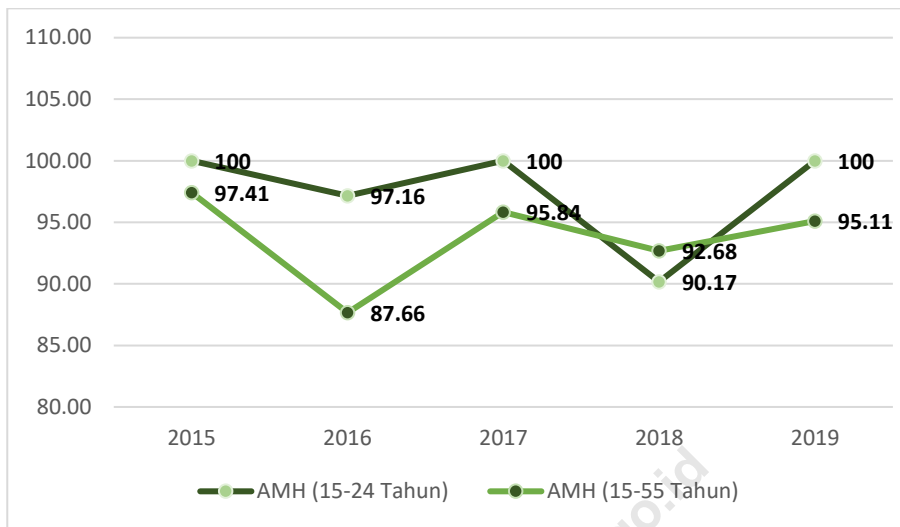
Gambar 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah yang dibatasi pada penduduk miskin umur 12-24 dan 15-55 tahun untuk Angka Melek Huruf dan umur 7-12 dan 13-15 tahun untuk Angka Partisipasi Sekolah menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun 2015-2019. Namun, angka tersebut menunjukkan peningkatan pada dua tahun terakhir, baik pada Angka Melek Huruf maupun Angka Partisipasi Sekolah.

Berdasarkan Gambar 5 dapat diketahui bahwa Angka Melek Huruf pada penduduk miskin golongan umur 15-24 tahun dibandingkan dengan golongan umur 15-55 tahun relatif lebih tinggi dari tahun ke tahun selama periode 2015-2019. Pada tahun 2019, Angka Melek Huruf pada penduduk miskin golongan umur 15-24 tahun mencapai 100 persen yang artinya tidak ada penduduk miskin umur 15-24 tahun yang buta huruf. Sementara itu pada penduduk miskin golongan umur 15-55 tahun, masih terdapat 4,89 persen yang buta huruf.

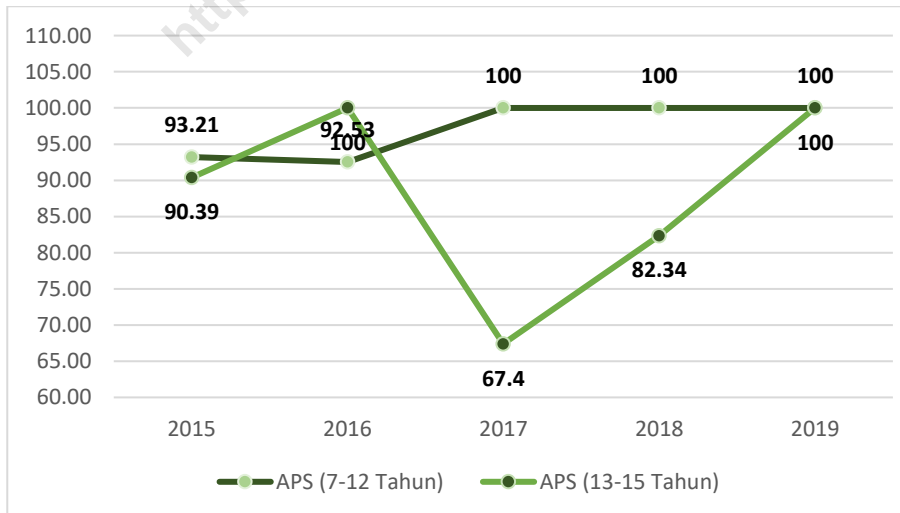
Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019



Gambar 5. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Gambar 6 berikut menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk miskin menurut golongan umur 7-12 dan 13-15 tahun di Kabupaten Soppeng tahun 2015-2019.



Gambar 6. Angka Melek Huruf Penduduk Miskin menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Jika dilihat dua tahun terakhir, rumah tangga miskin sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan bagi anak-anak mereka, khususnya untuk pendidikan sekolah dasar. Bahkan persentase Angka Partisipasi Sekolah untuk golongan umur 7-12 tahun sudah mencapai 100 persen pada tahun 2018 dan 2019. Hal yang sama dapat diamati juga pada penduduk miskin golongan umur 13-15 tahun dimana persentase Angka Partisipasi Sekolahnya telah mencapai 100 pada tahun 2019, meningkat dari 82,34 persen pada tahun sebelumnya.

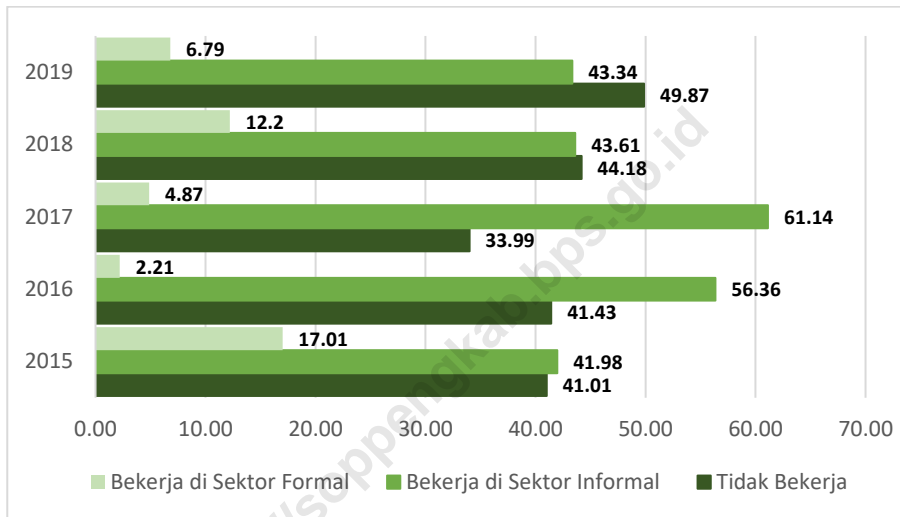
3.2.2 Ketenagakerjaan

Haughton dan Khander (2009) memasukkan karakteristik ekonomi pada level rumah tangga dan individu sebagai salah satu faktor penyebab kemiskinan. Karakteristik ekonomi tersebut salah satunya adalah permasalahan ketenagakerjaan. Dian Octaviani (2001, dalam Wijayanto 2010) menyatakan bahwa sebagian rumah tangga di Indonesia memiliki ketergantungan yang sangat besar atas pendapatan gaji atau upah yang diperoleh saat ini. Hilangnya lapangan pekerjaan menyebabkan berkurangnya sebagian besar penerimaan yang digunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Jika masalah pengangguran ini terjadi pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah (terutama kelompok masyarakat dengan tingkat pendapatan sedikit berada di atas garis kemiskinan), maka insiden pengangguran akan dengan mudah menggeser posisi mereka menjadi kelompok masyarakat miskin.

Berdasarkan Gambar 7 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019, penduduk miskin di Kabupaten Soppeng banyak bekerja di sektor informal. Hal tersebut dapat diketahui dari perbedaan antara persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor formal dan informal. Persentase penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 43,34 persen, sedangkan penduduk yang bekerja di sektor formal hanya 6,79 persen. Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, karakteristik penduduk miskin di Kabupaten Soppeng umumnya masih bekerja di sektor informal daripada bekerja di

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

sektor formal, hanya segelintir orang saja yang bekerja di sektor formal yang angkanya tidak pernah lebih dari 18 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Di sisi lain, persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran dari tahun sempit fluktuatif mengalami kenaikan dan penurunan, tetapi pada tahun 2019 angkanya naik lagi menjadi 49,87 persen.



Gambar 7. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Status Pekerjaan Informal dan Formal di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

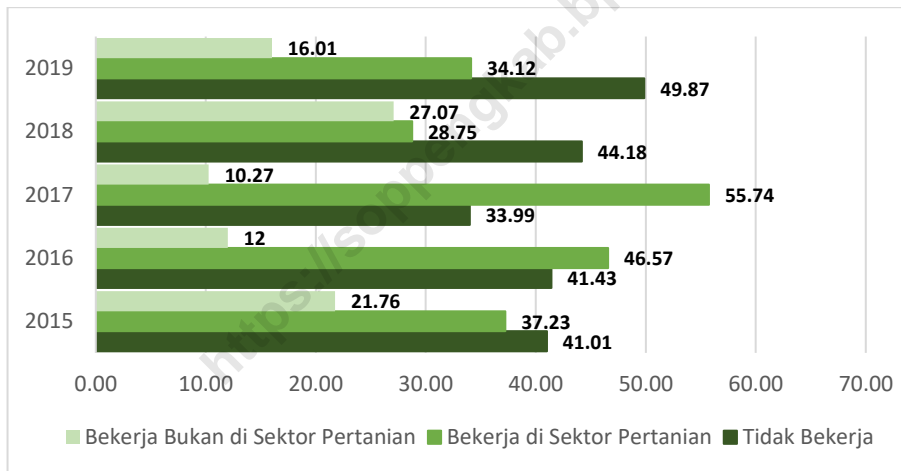
Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Selain dibedakan ke dalam sektor formal dan informal, penduduk miskin usia 15 tahun ke atas dapat dibedakan juga ke dalam sektor pekerjaan pertanian dan non pertanian. Berdasarkan Gambar 8 dapat diketahui bahwa penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih banyak yang bekerja di sektor pertanian. Sebanyak 34,12 persen penduduk miskin usia 15 tahun ke atas bekerja di sektor pertanian, baik pertanian tanaman padi dan palawija, hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, dan pertanian lainnya. Persentase tersebut dua kali lipat lebih banyak dari penduduk miskin

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

usia 15 tahun ke atas yang bekerja bukan di sektor pertanian, yaitu sebanyak 16,01 persen.

Berdasarkan Gambar 8, selama lima tahun terakhir penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng umumnya bekerja di sektor pertanian, hanya segelintir orang saja yang bekerja bukan di sektor pertanian yang angkanya tidak pernah lebih dari 30 persen dari keseluruhan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas. Meskipun cukup fluktuatif, jika dibandingkan antara tahun 2015 dan tahun 2019 penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari 37,23 persen menjadi 34,12 persen, meskipun sempat mengalami peningkatan selama dua tahun terakhir pada 2018-2019.



Gambar 8. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas menurut Sektor Pekerjaan Non Pertanian dan Pertanian di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

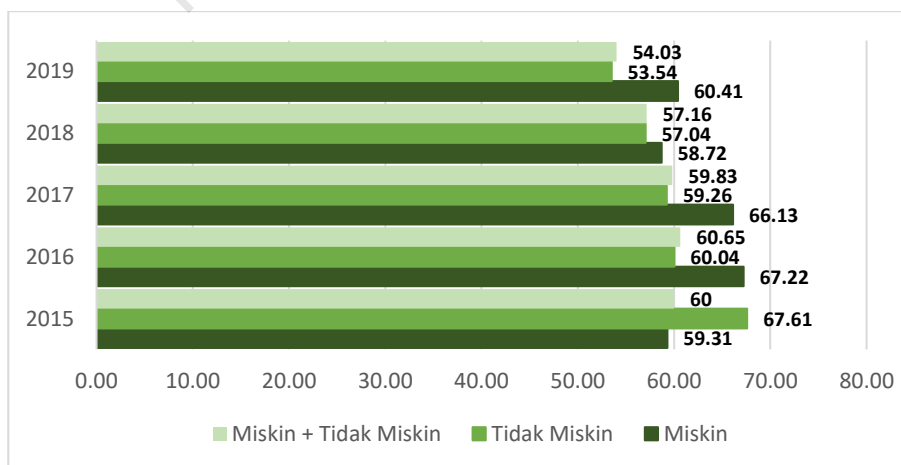
3.2.3 Pengeluaran per Kapita

Makanan telah dijadikan indikator oleh ahli ekonomi untuk melihat tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Seperti Ernest Engel, yang dikenal dengan hukum Engel, menyebutkan bahwa semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka proporsi pengeluaran masyarakat untuk

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

makanan semakin kecil. Dengan kata lain, seiring dengan peningkatan pendapatan maka lambat laun akan terjadi pergeseran, yaitu penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan untuk non-makanan. Pergeseran komposisi atau pola pengeluaran tersebut terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah. Dengan demikian, pangsa (*share*) pengeluaran makanan rumah tangga merupakan salah satu indikator tingkat kemakmuran masyarakat. Sehingga pangsa (dalam %) pengeluaran untuk makanan semakin kecil, maka tingkat kemakmuran masyarakat dikatakan makin membaik (Trisnowati dan Budiwinarto, 2013).

Berdasarkan Gambar 9 dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 sebanyak 60,41 persen pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan. Persentase tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan pengeluaran per kapita penduduk tidak miskin untuk makanan yang hanya 53,54 persen. Hal serupa juga terjadi dalam lima tahun terakhir, pada periode 2015-2019 pengeluaran per kapita untuk makanan penduduk miskin umumnya selalu lebih besar daripada pengeluaran per kapita untuk makanan dari penduduk tidak miskin.



Gambar 9. Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

3.2.4 Fasilitas Perumahan

Kondisi perumahan dan akses infrastruktur publik akan berdampak luas terhadap pengembangan potensi dan produktivitas penduduk miskin. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan melihat fasilitas jamban sendiri/bersama dan akses terhadap air bersih (Rusastra dan Napitupulu, 2008).

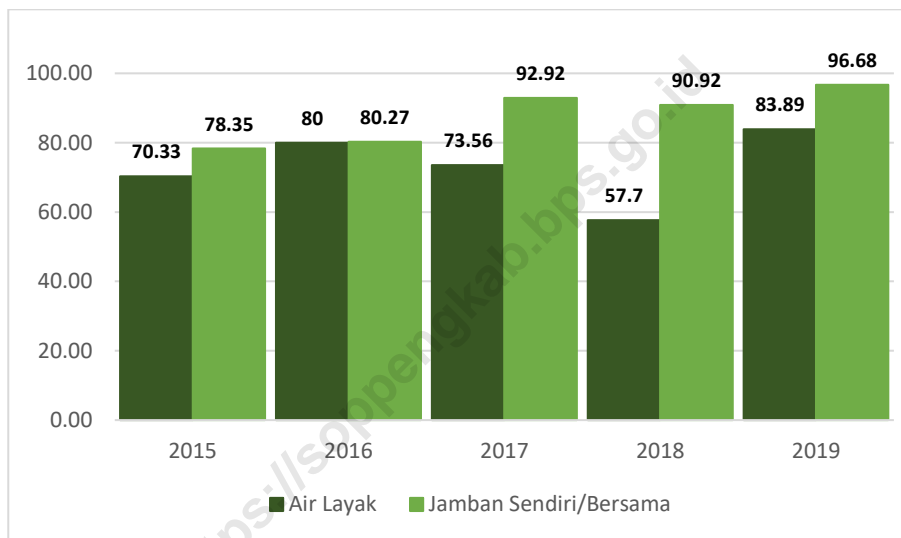
Dalam hal kelengkapan fasilitas rumah yang dilihat dari ketersediaan air layak, Kabupaten Soppeng termasuk kabupaten yang persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak cukup tinggi. Berdasarkan Gambar 10 pada tahun 2019 tercatat 83,89 rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng telah menggunakan air layak untuk keperluan sehari-hari. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 57,70 persen. Sementara itu apabila dilihat dari fasilitas jamban, diketahui bahwa 96,68 persen rumah tangga miskin telah menggunakan jamban sendiri/bersama. Hal tersebut juga meningkat dibandingkan dengan tahun 2018, walaupun persentasenya sudah tinggi yaitu 90,92 persen.

Jika dilihat pada periode tahun 2015-2019 seperti yang terlihat pada Gambar 10, dapat diketahui bahwa baik penggunaan air layak maupun fasilitas jamban sendiri/bersama oleh rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng sempat mengalami kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019, angka persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, bahkan persentasenya tertinggi dalam lima tahun terakhir. Pun dengan rumah tangga miskin yang menggunakan jamban sendiri maupun bersama di Kabupaten Soppeng jumlahnya mencapai 96,68 persen pada tahun 2019, merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Haughton dan Khander (2009) mengatakan kelengkapan fasilitas rumah tangga seperti akses terhadap air layak dan sanitasi akan berpengaruh pada kesehatan anggota rumah tangga, yang merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan yang dilihat dari karakteristik sosial rumah tangga.

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Peningkatan persentase rumah tangga miskin yang menggunakan air layak dan jamban sendiri/bersama selama lima tahun terakhir merupakan modal yang bagus dalam upaya perbaikan pola hidup sehat dalam rumah tangga miskin dan sudah tentu hal ini perlu didukung oleh pemerintah Kabupaten Soppeng dalam menyediakan fasilitas air minum yang layak maupun jamban yang dapat diakses bersama bagi masyarakat yang belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut secara mandiri.



Gambar 10. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Minum Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

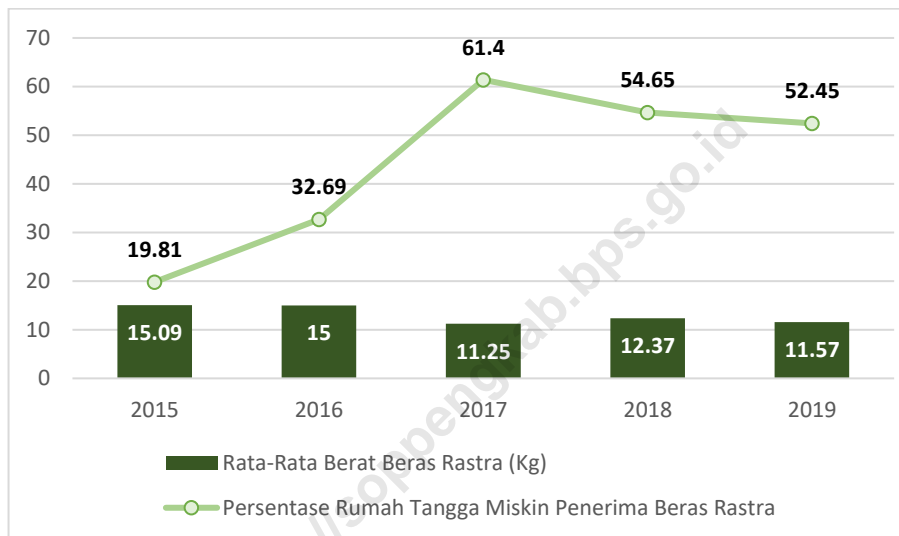
3.3 Program Penanggulangan Kemiskinan

Pada tahun 2019, terdapat sebanyak 52,45 persen rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan rastra. Setiap rumah tangga miskin menerima rastra dengan berat rata-rata 11,57 kg.

Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya dalam lima tahun terakhir seperti yang ada pada Gambar 11, persentase rumah tangga miskin penerima bantuan rastra di Kabupaten Soppeng mengalami penurunan terutama sejak 2017 hingga 2019. Begitu juga dengan rata-rata

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

berat rastra yang diperoleh, jika dibandingkan dengan tahun 2015, rata-rata berat rastra yang diperoleh menurun dari 19,81 kg menjadi 11,57 kg pada tahun 2019. Hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah Kabupaten Soppeng terutama untuk menjaga agar bantuan rastra tersebut tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan rumah tangga miskin yang ada di Kabupaten Soppeng.



Gambar 11. Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Bantuan Rastra/Raskin dan Berat Rata-Rata Beras Rastra di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Sumber Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

BAB IV

PENUTUP

<https://soppengkab.bps.go.id>

BAB IV PENUTUP

Pada tahun 2019 masih terdapat sekitar 16,45 ribu jiwa atau sekitar 7,25 persen penduduk Kabupaten Soppeng yang tergolong miskin. Jika dilihat dari periode tahun 2015-2019, jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dari 18,9 ribu jiwa menjadi 16,45 ribu jiwa. Pada periode tahun tersebut, angka persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 8,36 persen menjadi 7,25 persen.

Angka indeks ketimpangan kemiskinan Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan mencapai angka 0,69 persen pada tahun 2018. Ini berarti bahwa kesenjangan antara rata-rata pengeluaran konsumsi penduduk miskin dan garis kemiskinan semakin mengecil, yaitu hanya sebesar 0,69 persen. Begitu pula dengan indeks keparahan kemiskinan yang juga mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dan pada tahun 2019 mencapai angka 0,12 persen. Nilai ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pengeluaran konsumsi antar penduduk miskin mengalami penurunan.

Profil rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng tahun 2019 yang memiliki keterkaitan dengan konsep kemiskinan secara konseptual, antara lain:

1. Tingkat pendidikan penduduk miskin usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD atau tidak bersekolah.
2. Seluruh penduduk miskin kelompok umur 15-24 sudah terbebas dari buta huruf, sedangkan penduduk miskin kelompok umur 15-55 tahun hampir semuanya terbebas dari buta huruf.
3. Angka partisipasi sekolah penduduk miskin di Kabupaten Soppeng, baik kelompok umur 7-12 maupun 13-15 tahun telah mencapai mencapai 100 persen.

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

4. Persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang tidak bekerja atau pengangguran di Kabupaten Soppeng pada tahun 2015-2019 terlihat fluktuatif, tetapi cenderung meningkat dalam tiga tahun terakhir.
5. Sebagian besar pengeluaran per kapita penduduk miskin di Kabupaten Soppeng pada tahun 2019, masih digunakan untuk membiayai komoditi makanan.
6. Pada tahun 2019, lebih dari setengah dari keseluruhan rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng dapat menyediakan air layak minum bagi anggota rumah tangganya dan hampir seluruh rumah tangga miskin mempunyai fasilitas jamban baik sendiri maupun bersama.
7. Pada tahun 2019, hanya sekitar setengah dari keseluruhan rumah tangga miskin di Kabupaten Soppeng yang menerima bantuan rastra dan rata-rata berat rastra yang diterima mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir.

<http://www.kab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA DAN LAMPIRAN

<https://soppengkab.bps.go.id>

DAFTAR PUSTAKA

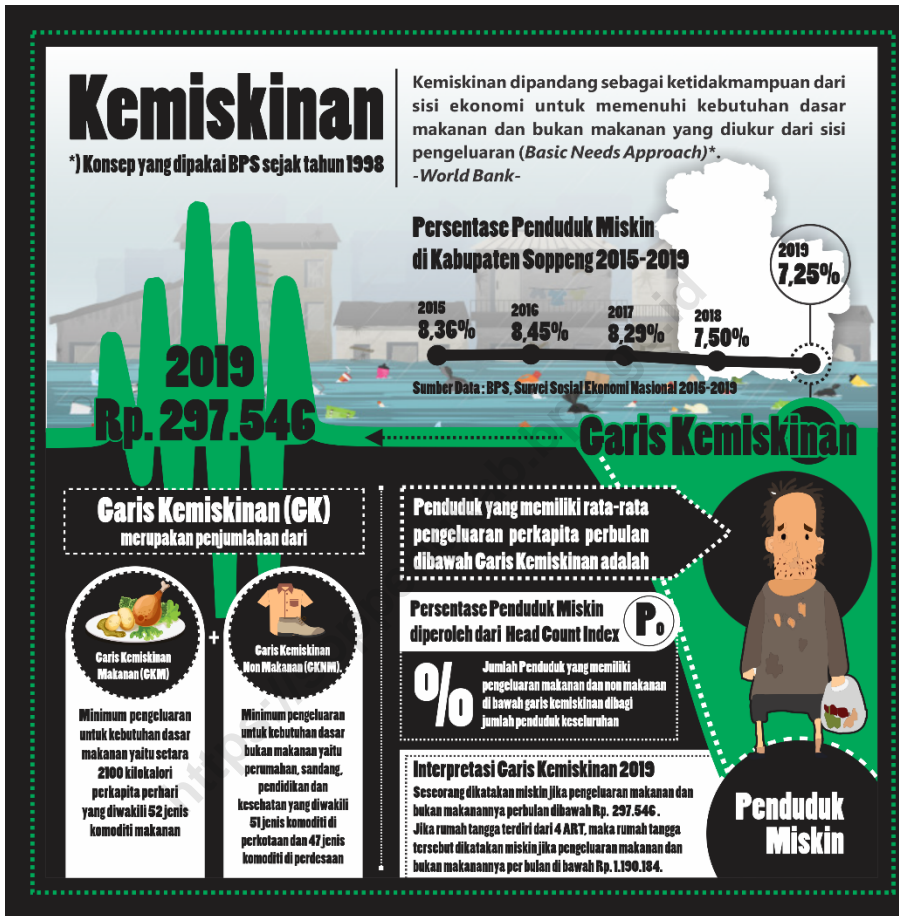
- Badan Pusat Statistik. (2007). Memahami Data Strategis yang Dihasilkan BPS. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2008). Analisis dan Penghitungan Tingkat Kemiskinan 2008. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2017). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2016. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2018). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2019). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2018. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. (2020). Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan. (2020). Data dan Informasi Kemiskinan Sulawesi Selatan 2019. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Cahyo, Agus Dwi. (2017). Peran Jarak Migrasi pada Model Pengaruh Karakteristik Demografi, Ekonomi, dan Sosial terhadap Kemiskinan Rumah Tangga Migran yang Tinggal di Daerah Perkotaan di Indonesia [Skripsi]. Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Statistik.
- Haughton, Jonathan dan Khandker, Shahidur R. (2009). Handbook on Poverty and Inequality. Washington DC: World Bank.
- Irawan, Puguh Bodro, et al. (2017). Official Statistics Sosial-Kependudukan Dasar. Bogor: In Media.
- Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lembaran Negara RI Tahun 2003, No. 78. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Rusastra, I Wayan dan Napitupulu, Togar A. (2007). Karakteristik Wilayah dan Keluarga Miskin di Perdesaan: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan. Jurnal Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian : 9-22.

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

- Suryawati, Chriswardani. (2005). Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional. Jurnal Manajemen Pembangunan dan Kebijakan, Volume 08, No. 03, Edisi September (121-129).
- Trisnowati, Juni dan Budiwinarto, Kim. (2013). Kajian Pengaruh Harga dan Pendapatan terhadap Proporsi Pengeluaran Makanan Rumah Tangga (Pendekatan Model Linier Permintaan Lengkap). Jurnal Prosiding Seminar Nasional Statistika Universitas Diponegoro: 123-134.
- Wijayanto, Ravi Dwi. (2010). Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2005-2008 [Skripsi]. Semarang: Universitas Diponegoro.

<https://soppengkab.bps.go.id>

LAMPIRAN



Gambar 12.
Sumber

Infografis Kondisi Kemiskinan di Kabupaten Soppeng Tahun 2019
Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, P_1 , P_2 dan Garis Kemiskinan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin	P_1	P_2	Garis Kemiskinan (Rp per Kapita per Bulan)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2015	18,90	8,36	0,98	0,19	213.164
2016	19,12	8,45	1,73	0,50	220.192
2017	18,76	8,29	1,25	0,28	225.936
2018	17,00	7,50	1,39	0,37	253.457
2019	16,45	7,25	0,69	0,12	297.546

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Tahun	Pendidikan yang Ditamatkan		
	Tidak Tamat SD	Tamat SD/SMP	SMA+
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	57,59	33,77	8,64
2016	49,22	40,54	10,24
2017	42,03	50,82	7,15
2018	46,53	45,78	7,68
2019	45,62	45,43	8,95

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 3. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah menurut Golongan Umur di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Tahun	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
	15-24 Tahun	15-55 Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2015	100,00	97,41	93,21	90,39
2016	97,16	87,66	92,53	100,00
2017	100,00	95,84	100,00	67,40
2018	90,17	92,68	100,00	85,59
2019	100,00	95,11	100,00	100,00

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Status Bekerja di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Tahun	Status Bekerja		
	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	41,01	41,98	17,01
2016	41,43	56,36	2,21
2017	33,99	61,14	4,87
2018	44,18	43,61	12,20
2019	49,87	43,34	6,79

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas menurut Sektor Pekerjaan di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Tahun	Sektor Pekerjaan		
	Tidak Bekerja	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	41,01	37,23	21,76
2016	41,43	46,57	12,00
2017	33,99	55,74	10,27
2018	44,18	28,75	27,07
2019	49,87	34,12	16,01

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 6. Persentase Pengeluaran per Kapita untuk Makanan menurut Status Miskin di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Tahun	Status Miskin		
	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2015	59,31	67,61	60,00
2016	67,22	60,04	60,65
2017	66,13	59,26	59,83
2018	58,72	57,04	57,16
2019	60,41	53,54	54,03

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten Soppeng Tahun 2019

Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menggunakan Air Layak dan Jamban Sendiri/Bersama di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

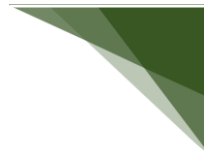
Tahun	Air Layak	Jamban Sendiri/Bersama
(1)	(2)	(3)
2015	70,33	78,35
2016	80,00	80,27
2017	73,56	92,92
2018	57,70	90,92
2019	83,89	96,68

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019

Tabel 8. Persentase Rumah Tangga Miskin yang Menerima Rastra/Raskin dan Rata-Rata Berat Beras Rastra/Raskin yang Diterima di Kabupaten Soppeng, 2015-2019

Tahun	Persentase Rumah Tangga Miskin Penerima Rastra/Raskin	Rata-Rata Berat Rastra/Raskin yang Diterima Rumah Tangga Miskin
(1)	(2)	(3)
2015	19,81	15,09
2016	32,69	15,00
2017	61,40	11,25
2018	54,65	12,37
2019	52,45	11,57

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2015-2019



<https://soppengkab.bps.go.id>

DATA

Mencerdaskan Bangsa



BADAN PUSAT STATISTIK KABUPATEN SOPPENG

Jl. Salotungo No. 127, 90812 Watansoppeng Sulawesi Selatan,
Telp (0484) 21060, Faks (0484) 23377, Mailbox : soppengkab@bps.go.id